

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berbasis masyarakat¹ sesungguhnya merupakan wacana baru yang muncul dalam dunia pendidikan, terutama bagi masyarakat Indonesia² setelah pemerintah memberlakukan kebijakan desentralisasi dalam sistem pendidikan. Dalam wujud nyatanya pemerintah memberlakukan undang-undang otonomi daerah. Dalam hal ini tidak luput tentunya sistem pendidikan secara rasional mengikuti atas kebijakan desentralisasi tersebut. Desentralisasi pendidikan mengandung pemahaman bahwa pendidikan membutuhkan unsur berbasis kebutuhan masyarakat. Daerah diharapkan mampu membangun peradaban pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri.

Dengan demikian, lembaga pendidikan berusaha mencari jawaban dengan merespon kebutuhan daerah atau masyarakat. Salah satu respon otonomi sekolah yang merupakan imbas desentralisasi pendidikan adalah Manajemen

¹ Pendidikan yang dirancang oleh masyarakat untuk membelajarkan masyarakat agar mereka berdaya sehingga mereka memiliki kekuatan untuk membangun dirinya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, konsep pendidikan berbasis masyarakat bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat. Lihat Umberto Sihombing, *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 186.

² Dilihat dari perjalanannya kebijakan MBS di Indonesia relatif baru dimulai sejak tahun 1999/2000, yaitu dengan peluncuran dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang disetor langsung ke rekening sekolah tidak melalui alur birokrasi pendidikan di atasnya (Dinas Diknas) yang kemudian diubah menjadi *Dana Rintisan* untuk MPMBS memasuki tahun anggaran 2003. Hal ini merupakan perwujudan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah di bidang Pendidikan dan UU nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah, dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28. Sementara pada tahun 1988 *American Association of School Administrators, National Association of Elementary School Principals, and National Association of Secondary School Principals*, menerbitkan dokumen berjudul *School Based Manajemen, a Strategy for Better Learning*. Agus Dharma, "Manajemen Berbasis Sekolah: Belajar dari Pengalaman Orang lain", *Artikel Pendidikan Network* (2003).

Berbasis Sekolah (MBS).³ Gagasan besar MBS sekedar mereplikasi konsep dasar pengelolaan manajerial pendidikan yang diberlakukan di Amerika.⁴ Padahal nilai dasar MBS yang lebih memberi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendidikan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional kita.⁵ Pondok pesantren misalnya, diasumsikan dalam sistem pendidikannya telah memiliki konsep yang cukup signifikan atas tuntutan masyarakat di sekitarnya.⁶ Keberadaan pesantren tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan tuntutan umat karena pesantren mampu menjaga harmonisasi dengan masyarakat di sekitarnya sehingga eksistensinya sama sekali tidak terasing di tengah masyarakatnya. Hal ini menjadikan segala aktivitas pesantren mendapat sokongan penuh dari mereka.

³ Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki sejarah panjang, dapat dirunut sejak masa Aufklarung di Eropa yang mencapai puncaknya pada abad ke-18 hingga munculnya neoliberalisme dalam pendidikan abad ke-21. Di Indonesia, MBS merupakan sebagian gerakan paradigma baru manajemen pendidikan menggantikan paradigma lama yang tidak mampu menghadapi munculnya era global yang ditandai maraknya industrialisasi modern dan teknologi informasi elektronik. Ia muncul berkaitan dengan reformasi pendidikan yang menghendaki adanya pergeseran paradigma pendidikan dari sentralistik ke desentralistik, bergeser dari praktik pendidikan yang otoriter ke praktik pendidikan demokratis yang membebaskan, serta dari konsep pendidikan yang berorientasi pemerintah (*state oriented*) pada konsep pendidikan yang berorientasi kepada masyarakat (*community oriented*). Toto Suharto, "Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat" *Cakrawala Pendidikan*, XXIV, No. 3 (November, 2005), 325.

⁴ Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, 26.

⁵ Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pasal 55 ayat 1 telah diuraikan beberapa kerangka pengembangan pendidikan berbasis masyarakat, yakni "Bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat." (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang no. 2 tahun 1989 sebagai refleksi dari lahirnya reformasi dan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini lebih menekankan pada aspek desentralisasi dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi pendidikan)

⁶ Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia, menurut Suyata, bukanlah hal yang baru lagi. Ia telah dilaksanakan oleh yayasan-yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan oleh perseorangan. Suyata, *Community Participation in School Development: Acces, Demand, and School Construction* (Jakarta: Directorate of Secondary Education, Directorate General of Primary and Secondary Education, Ministry of Education and Culture, 1996), 2.

Sejak bergulirnya modernisasi pendidikan Islam di berbagai belahan dunia, kebanyakan lembaga-lembaga pendidikan tradisional tergerus bahkan lenyap akibat tergilas pendidikan umum. Tidak demikian halnya dengan pesantren yang masih tetap eksis dan bahkan mampu bersanding dengan pendidikan modern hingga kini.⁷ Pesantren selama ini telah memberlakukan MBS atau lebih tepatnya manajemen berbasis masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan.⁸ Walaupun pesantren dari sisi manajemen pendidikan, tidak memiliki akar akademis yang kompeten dalam mengatur sebuah administrasi pendidikan. Tetapi fakta menunjukkan pesantren telah menjadi lembaga pendidikan yang mampu hidup secara mandiri. Kemandirian itu tidak hanya dalam konsep pendidikan bagi para santrinya, tetapi termasuk pada pengelolaan pesantren dalam pendanaannya. Mastuhu melukiskan dengan tegas bahwa pesantren memiliki konsep biaya berapapun cukup, biaya berapapun tidak cukup.⁹

Dengan demikian, MBS untuk sekolah negeri merupakan gagasan yang baru, tapi bagi pesantren bukan hal yang baru lagi. Namun demikian, belum ada cukup bukti yang menunjukkan pesantren telah memberlakukan

⁷ Abasri, "Sejarah dan Dinamika Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Nusantara" dalam *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Editor Samsul Nizar (Jakarta: Kencana, 2011), 286-287.

⁸ Secara khusus Azra menyebutkan, di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan berbasis masyarakat telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu setua sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara. Hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari rangkang, dayah, meunasah (Aceh), surau (Minangkabau), pesantren (Jawa), *bustān al-ʿaḫḫāl*, *diniyah* dan sekolah-sekolah Islam lainnya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat Muslim. Lembaga-lembaga ini hanya sekedar contoh bagaimana konsep pendidikan berbasis masyarakat diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam lintasan sejarah. Azyumardi Azra, "Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah" Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan di Hotel Indonesia, Jakarta 8-10 Agustus 2002, kerjasama Universitas Negeri Jakarta dengan Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia, 5-6.

⁹ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pesantren* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 146.

manajemen tersebut. Maka penelusuran secara mendalam tentang manajemen pengelolaan pesantren berbasis masyarakat menjadi penting dilakukan karena pesantren ini sama sekali belum tersentuh oleh proyek MBS pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, Pondok Pesantren al-Mubarak Lanbulan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang merupakan pesantren yang pengelolaan dan perkembangannya tidak lepas dari peran masyarakat meskipun peran sentral kyai masih berlaku. Hal ini disebabkan pengaruh pendiri pesantren pada awalnya cukup besar terhadap masyarakat di sekitarnya, hingga pada saat sekarang. Pesantren ini dirintis oleh KH. Muhammad Fathullāh, putera dari KH. Fathullāh dan Nyai Dewi Fatimah.¹⁰ Setelah wafat, kepemimpinan digantikan oleh puteranya yakni KH. ‘Abdul ‘Adīm Muhammad Fathullāh, KH. Ahmad Bārīzī Muhammad Fathullāh dan KH. Ahmad Ghazālī Muhammad Fathullāh sampai sekarang. Dalam usia yang relatif muda, sudah melahirkan ratusan alumni dari berbagai penjuru wilayah di tanah air, terutama di Madura itu sendiri. Hal ini tidak lepas dari peranan pesantren itu sendiri terhadap perkembangan masyarakat. Sehingga keberadaan masyarakat di sekitarnya mulai terakomodir dan merasa memiliki tanggung jawab untuk selalu mengembangkan pesantren tersebut.

Sampai saat ini pesantren al-Mubarak Lanbulan masih eksis dengan ciri khas yang merupakan gambaran sosok pesantren dalam bentuk tradisional murni yakni; adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kiai, adanya kepatuhan santri pada kiai, hidup sederhana, mandiri, tolong-menolong dan

¹⁰ Mengenai pesantren Lanbulan, baik sejarah maupun lainnya akan dijelaskan pada hasil temuan penelitian di Bab III.

suasana persaudaraan, disiplin, siap menderita untuk mencapai sebuah tujuan, dan pemberian ijazah.¹¹ Yang lebih menarik untuk diteliti ialah di samping peran pesantren dalam hal keagamaan, pesantren ini juga melakukan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemeliharaan hewan ternak yang pada akhirnya ketika dijual akan dilakukan pembagian sama rata tidak seperti pada umumnya (bagi hasil). Dari program tersebut tidak ada yang dirugikan di antara kedua pihak meskipun harga hewan tidak stabil. Selain contoh yang disebutkan tadi masih banyak program lain yang menunjang terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dirasa penting melakukan penelitian tentang Pesantren Berbasis Masyarakat; Studi tentang Manajemen Pondok Pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang Madura.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memperoleh banyak informasi tentang pendidikan berbasis masyarakat dalam manajemen pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang, yaitu sebagai berikut:

1. Belum diketahui relevansi program manajemen pesantren terhadap situasi dan kondisi lingkungan masyarakat.

¹¹ Ciri-ciri tersebut oleh Abasri dikategorikan sebagai ciri khas pesantren tradisional murni, walaupun ia menegaskan bahwa pesantren semacam ini amat sulit ditemukan, karena pesantren telah mengalami transformasi sedemikian rupa sehingga diklasifikasi dalam 3 corak: *pertama*, pesantren yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya atau tidak ada corak perubahan yang menonjol dalam pendidikannya. Umumnya terdapat di pedesaan atau di daerah pedalaman. *Kedua*, corak pesantren yang mulai mengadopsi sistem pendidikan modern walaupun tidak keseluruhannya. *Ketiga*, corak pesantren yang telah sepenuhnya menganut sistem modern. Lihat Abasri, *Sejarah dan Dinamika*, 291.

2. Belum diketahui ketersediaan dan kesiapan input-input pendidikan yang mendukung terlaksananya program manajemen pesantren.
3. Belum diketahui keterbukaan manajemen pesantren, baik dari segi pendanaan, kurikulum, sarana, ketenagaan dan lain sebagainya.
4. Diduga iklim kerjasama antara komunitas pesantren dengan masyarakat terlaksana dengan baik.
5. Belum maksimalnya bentuk partisipasi warga pesantren, masyarakat dan *stakeholder* dalam pengimplementasian pengelolaan pesantren.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian pendidikan ini dibatasi pada lingkup keterlibatan dan pola relasi pesantren dengan masyarakat dalam pengelolaan Pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang. Penelitian ini akan menguraikan beberapa hal, antara lain: *Pertama*, perumusan kurikulum, merupakan materi dari tingkat kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik. Di dalam standar isi termasuk kompetensi para tamatan, kompetensi mata pelajaran, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan/akademik dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kedua, mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, yakni tentang kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru serta tenaga kependidikan lainnya. *Ketiga*, sarana dan prasarana, mengenai kriteria minimal tentang ruang belajar,

perpustakaan, tempat olah raga, tempat ibadah, tempat bermain dan rekreasi, laboratorium, bengkel kerja, sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam standar ini termasuk pula penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. *Keempat*, kesiswaan dan out-put pendidikan. *Kelima*, pembiayaan, yakni berkaitan dengan komponen dan besarnya biaya operasional pendidikan selama satu tahun. Dan *Keenam*, hubungan pesantren dan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pesantren berbasis masyarakat di Pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang?
2. Bagaimana peran-peran masyarakat dalam mengelola pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang?
3. Bagaimana kontribusi Pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang terhadap pemberdayaan atau pengembangan masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mengetahui manajemen pesantren berbasis masyarakat di Pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang?
2. Mengetahui peran-peran masyarakat dalam mengelola pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang?
3. Mengetahui kontribusi Pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang terhadap Peemberdayaan atau pengembangan masyarakat?

E. Kegunaan Penelitian

Selain beberapa tujuan di atas, penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis diharapkan bisa memperkaya kajian tentang relasi antara pesantren dengan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam mengembangkan pendidikan pesantren. Sedangkan secara praktis diharapkan menjadi bahan referensi bagi lembaga pendidikan utamanya pesantren untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri.

F. Kerangka Teori

Sebagaimana kita ketahui bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berfungsi sebagai benteng pertahanan dan pusat dakwah serta pengembangan Islam Indonesia.¹² Pesantren telah lahir, tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, pesantren masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut tidak hanya di bidang agama melainkan bidang sosial, pendidikan, budaya dan sebagainya. Upaya pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui adaptasi pesantren dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat tanpa menghilangkan ciri tradisionalnya.

Di samping itu, pembaruan pesantren menjadi syarat untuk dapat mengkontekstualisasikan nilai-nilai kehidupan guna memfungsionalisasikan diri agar peranan dan sumbangannya sebagai pelaku pembangunan masyarakat dirasakan secara nyata. Upaya pembangunan dan pengembangan masyarakat (*community development*) yang dilakukan pesantren bisa mencakup empat

¹² Nina M. Armando, et al, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 96.

aktifitas penting,¹³ yaitu membebaskan dan menyadarkan masyarakat, menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat, mendidik dan menciptakan pengetahuan dan memelopori cara mendekati masalah secara benar sehingga masyarakat mengetahui kebutuhan riilnya. Pada konteks ini, pesantren menempatkan diri sebagai institusi dinamisator dan katalisator pembangunan masyarakat dalam bidang kehidupan manusia.

Pembangunan dan pengembangan bahkan perubahan masyarakat diorientasikan pada kondisi masyarakat yang lebih baik. Sebagai institusi dinamisator dan katalisator, pesantren dapat melakukannya melalui gagasan/idenya. Max Weber mengakui bahwa perubahan sosial tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, namun juga oleh nilai-nilai dan ide.¹⁴ Dalam tinjauan sosiologis, perubahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat setidaknya mencakup tiga dimensi yaitu dimensi struktural, dimensi kultural dan dimensi interaksional.¹⁵

Begitu juga sebaliknya, pondok pesantren yang merupakan salah satu bentuk pendidikan berbasis masyarakat telah lahir dan berkembang dari

¹³ Manfred Open dan Wolfgang Kalcher, *Dinamika Pesantren* (Jakarta: P3M, 1988), 150.

¹⁴ Eva Efxioni Halevy, *Social Change: The Advent and Maturation of Modern Society* (London and New York: Routledge & Kegan Paul, 1987), 22.

¹⁵ Himes J.S. dan Moore, *Study of Sociology* (Atlanta: Scott Foresman, 1968), 430. Dimensi perubahan struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktural masyarakat menyangkut dalam perubahan peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan lembaga sosial. Sedangkan perubahan dalam dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat seperti adanya penemuan dalam berpikir, pembaharuan hasil (*invention*) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. Kesemuanya itu meningkatkan adanya integrasi unsur-unsur baru ke dalam kebudayaan. Secara ringkas, dimensi perubahan kultural meliputi inovasi kebudayaan seperti penemuan, peniruan atau peminjaman alat-alat, difusi seperti penyimpangan kebudayaan dan integrasi seperti penolakan terhadap bentuk-bentuk baru, duplikasi, cara hidup lama dan baru bersama-sama dalam variabel dan penggantian bentuk-bentuk lama dengan bentuk-bentuk baru. Adapun perubahan pada dimensi interaksional berkaitan dengan perubahan pada relasi sosial yang menyangkut frekuensi (jumlah atau kontinuitas) jarak sosial seperti intimitas, informal, formal (perenggangan), peralatan atau medium yang digunakan, keteraturan dalam jenisnya.

masyarakat. Secara historis, munculnya pesantren tidak lepas dari keinginan masyarakat akan pentingnya pusat pendidikan Islam di Indonesia karena pesantrenlah yang pada mulanya sebagai representasi dari lembaga pendidikan Islam di tanah air. Hingga dewasa ini, keberadaan pesantren tidak lepas dari peran serta masyarakat, baik dari pengelolaan maupun dalam hal pemberdayaannya. Dari sanalah sudah jelas bahwa keterkaitan pesantren dengan masyarakat sangatlah erat, bahkan bisa dikatakan “pesantren tanpa masyarakat tidak akan berkembang dan masyarakat tanpa pesantren akan pincang”. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pesantren, maka pesantren tidak akan kehilangan fungsi utamanya. Namun, sistem manajerial pesantren yang terkesan serba mono perlu dipertimbangkan dan disesuaikan dengan masyarakat yang dihadapinya.

Maka dari itu, kaitannya dengan manajemen pendidikan, maka teori modern lebih tepat untuk dijadikan cara pandang dalam memahami kondisi pendidikan yang dalam hal ini adalah pesantren. Pendekatan modern berdasarkan hal yang sifatnya situasional. Artinya orang menyesuaikan diri dengan situasi dihadapi dan mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Teori ini berasumsi bahwa manusia itu berlainan dan berubah, baik kebutuhannya, reaksinya, tindakannya yang semuanya bergantung pada lingkungan.¹⁶

Selanjutnya manusia itu berkerja dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sistem terhadap manajemen berusaha untuk

¹⁶ Masmuni, “Teori Manajemen Pendidikan” dalam <http://edukasi.kompasiana.com/2010/12/01/teori-teori-manajemen-pendidikan-322603.html> (4 September 2013), 1.

memandang organisasi sebagai sebuah sistem yang menyatu dengan maksud tertentu yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan. Menurut Murdik dan Rossa, sistem organisasi itu sendiri dari individu, organisasi formal, organisasi informal, gaya kepemimpinan, dan perangkat fisik yang satu sama lain saling berhubungan. Sistem diidentifikasi mempunyai makna, yaitu:

1. Terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya
2. Bagian-bagian yang saling berhubungan itu dapat berfungsi baik secara independen maupun secara bersama-sama
3. Berfungsinya bagian-bagian tersebut ditunjukkan untuk mencapai tujuan umum secara keseluruhan
4. Suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian itu sendiri dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen berdasarkan sistem, mencakup:

1. Manajemen berdasarkan sasaran
2. Manajemen berdasarkan teknik
3. Manajemen berdasarkan struktur
4. Manajemen berdasarkan orang
5. Manajemen berdasarkan informasi

G. Penelitian Terdahulu

Lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah berciri khas Islam telah hadir dan menjadi bagian penting dari sistem

pendidikan di tanah air, jauh sebelum formasi negara Indonesia modern terbentuk. Tentu saja, diusianya yang cukup tua tersebut, lembaga-lembaga pendidikan Islam telah menarik banyak akademisi, praktisi pendidikan maupun para peneliti untuk melakukan penelusuran secara mendalam mengenai eksistensi dan sustainabilitasnya dengan perspektif dan pendekatan begitu beragam. Hingga saat ini, berbagai laporan riset tentang lembaga pendidikan Islam begitu banyak jumlahnya dan sebagian besar telah dipublikasikan secara luas.

Hanya saja menjadi menarik dicermati, keseluruhan riset yang dilakukan kurang memperhitungkan atau bahkan mengabaikan aspek terpenting dan menentukan dalam perkembangan dan keberlanjutan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah aspek terpenting dan menentukan yang mestinya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan sentuhan mendalam dari para akademisi, praktisi pendidikan maupun para peneliti. Sebagaimana hendak dibuktikan dalam riset ini, pengelolaan lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini pesantren, yang tidak memiliki akar akademis menjadi salah satu faktor utama yang sangat menyulitkan lembaga-lembaga pendidikan Islam berkembang dan bersanding setara dengan lembaga-lembaga pendidikan umum.

Penelitian tertua berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam dilakukan oleh Dhofier untuk kepentingan disertasinya di Antropologi Sosial, *Australian*

National University (ANU) Australia pada tahun 1980.¹⁷ Hasil studi telah dipublikasikan secara luas dengan judul "*Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*". Dua pesantren di Jawa, yaitu pesantren Tebuireng Jombang (Jawa Timur) dan Tegalsari, Surakarta (Jawa Tengah) menjadi lokus studi Dhafir. Nyaris sulit membantah bahwa, karya Dhafir ini begitu mendalam dan mengilhami munculnya penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang memilih fokus pada dinamika lembaga pendidikan Islam pesantren.¹⁸ Sayangnya, Dhafir lebih terfokus pada pola pembelajaran di pesantren, termasuk juga sistem kekerabatan dan kepemimpinan para pendiri dan pengelola pesantren. Sebaliknya, studi yang dilakukan mengabaikan begitu saja arti penting kebijakan Negara atau lembaga-lembaga pemerintah dalam perkembangan pesantren, terutama Tebuireng dan Tegalsari serta relasi yang bersifat mutualistik antara pesantren dan masyarakat. Padahal, fakta historis

¹⁷ Zamakhsyari Dhafir, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1983).

¹⁸ Kontribusi Dhafir bagi munculnya kajian-kajian atau riset-riset mendalam tentang lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren, salah satunya, diakui oleh Arifin. Ia mengatakan, "penelitian Zamakhsyari Dhofier segera mendapat perhatian dan menjadi rujukan peneliti berikutnya". Alasannya, "salah satu nilai lebih penelitian Zamakhsyari Dhofier bila dibandingkan dengan peneliti lainnya, adalah pada pencitraan terhadap komunitas pesantren yang terlanjur identik dengan Islam tradisional". Dalam studinya tersebut, ia berhasil memberikan citra baru tentang dunia pesantren, dan sekaligus menolak tesis dua orang " yang dinilai gagal dalam memahami pesantren, yakni Clifford Geertz dan Deliar Noer". Bagi Dhafir, "kedua nama tersebut secara sepihak mencitrakan komunitas Islam tradisional sebagai komunitas yang menempati posisi kelas dua di bawah komunitas Islam modernis" dan pada saat yang sama, Islam tradisional juga dianggap akrab dengan pelbagai praktik keagamaan sinkretik". Dari hasil studinya tersebut, "Dhofier justru menemukan berbagai episode kreatif pada komunitas Islam tradisional ini". Dan, "dengan menggunakan teori *continuity and change* (kesinambungan dan perubahan)", ia memberikan kesimpulan atas studinya bahwa, "pesantren sebagai pilar utama NU terus menggeliat merancang perubahan dengan tetap berpijak pada tradisi keilmuan klasik". Syamsul Arifin, "Pesantren sebagai Saluran Mobilitas Sosial, Suatu Pengantar Penelitian", *Salam, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 13, No. 1 (Januari-Juni, 2010), 36. Bandingkan dengan Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983); Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1985).

menunjukkan pesantren Tebuireng, misalnya, termasuk salah satu dari ribuan pesantren di Jawa dan Sumatra yang terkena dampak pemberlakuan kebijakan Ordonansi Guru yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tidak hanya itu, pendiri pesantren (Hasyim Asy'ari) yang mendapat perhatian khusus dalam studi Dhafir, dikenal luas sebagai salah satu tokoh yang melakukan perlawanan dan mendesak pencabutan kebijakan tersebut. Sebaliknya, perhatian Dhafir lebih diarahkan pada peran Hasyim Asy'ari dalam organisasi Nahdhatul Ulama (NU) dan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI).

Selanjutnya, Ali Mukayat meneliti tentang *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah* pada tahun 2004. Penelitian ini berusaha mengungkap realisasi Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri, ini sayangnya hanya murni fokus pada sekolah belum menyentuh pada manajemen pesantren.¹⁹ Weli Arjuna Wiwaha dalam Tesisnya yang berjudul *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan, Studi di Pesantren Nurul Hakim Lombok Barat, NTB*.²⁰ Walaupun penelitian ini berusaha mencoba mendeskripsikan bagaimana pesantren dapat mengelola keuangan namun belum menyentuh pada aspek partisipasi masyarakat.

As'ari, juga mencoba melakukan penelitian mengenai *Transparansi Manajemen Pesantren menuju Profesionalisme*.²¹ Dalam penelitiannya As'ari berusaha mengungkap bagaimana pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

¹⁹ Ali Mukayat, "Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

²⁰ Weli Arjuna Wiwaha, "Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan, Studi di Pesantren Nurul Hakim Lombok Barat NTB" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

²¹ As'ari, "Transparansi manajemen Pesantren menuju Profesionalisme Studi Kasus di Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo" (Tesis-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).

menerapkan manajemen pesantren dengan pemberlakuan nuansa struktur dan kultur. Nuansa struktur artinya manajemen sedikit mengadopsi dari manajemen pengelolaan keuangan modern baik pelaporan dan pembukuannya. Bernuansa kultur artinya juga mempertahankan ciri khas pesantren sebagai pendidikan berbasis masyarakat. Hanya saja penelitian ini masih parsial pada aspek pengelolaan keuangan saja padahal aspek manajemen berbasis masyarakat tidak hanya pada aspek itu tetapi menyangkut kurikulum, ketenagaan, sarana dan lain sebagainya.

Basuki juga ikut andil untuk mendalami pesantren melalui penelitiannya dengan judul *Peran Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri dalam Pengembangan Learning Society (Studi Multi-Kasus di Pasuruan, Malang dan Ponorogo)*.²² Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan empat temuan peran “Guru Tugas” PP. Sidogiri dalam mengembangkan *learning society* pada tataran realitas pendidikan Islam, *Pertama*, kegiatan mereka adalah misi kemanusiaan dan kemasyarakatan, di samping misi profesi yang dilaksanakan atas dasar kompetensi, komitmen, dan percaya diri dalam memenuhi panggilan warga masyarakat sadar dan peduli pendidikan diniyah ala Sidogiri. *Kedua*, mereka telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang tepat sebagai jaminan pendidikan diniyah terlaksana secara akuntabel, dan berkesinambungan. *Ketiga*, keberadaan mereka mendapatkan sambutan istimewa dari warga masyarakat pengguna. Ini adalah bukti di manapun warga tinggal pasti memerlukan “guru” dan oleh karena itulah guru berhak mendapatkan “penghormatan” yang layak.

²² Basuki, “Peran Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri dalam Pengembangan *Learning Society* (Studi multi-kasus di Pasuruan, Malang dan Ponorogo)” (Disertasi--Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

Sebab inti *learning society* adalah bergerakinya semua warga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan. *Keempat*, keberadaan mereka telah menimbulkan dampak positif lahirnya warga masyarakat sadar dan peduli pendidikan diniyah ala Sidogiri secara bertahap, yaitu *reading process, learning process, learning transformation, learning internalization dan learning excellence*. Namun, tetap saja penelitian ini masih bersifat parsial, yakni hanya memfokuskan pada peran guru tugas, bukan pesantren dan masyarakat yang cakupannya lebih luas.

Penelitian pesantren juga dilakukan oleh M. Bahri Ghazali pada tahun 1995 dalam Disertasinya dengan judul *Pengembangan Lingkungan Hidup dalam Masyarakat, Kasus Pondok Pesantren an-Nuqayah dalam Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Hidup*.²³ Menurutny, pesantren berpeluang menjadi salah satu alternatif jawaban umat Islam dalam memecahkan masalah sosial termasuk problem lingkungan hidup. Pesantren an-Nuqayah yang masih tetap mampu mempertahankan ciri tradisionalnya dan menerima adanya modernisasi baik di bidang pendidikan maupu bidang sosial, dalam menghadapi masalah sosial sikapnya sangat *reseptif* (menerima) dan adaptif (menyesuaikan) dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan pembangunan bahkan bersikap proaktif dalam berbagai hal pesantren seperti upayanya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun dalam penelitian ini tidak dijelaskan mengenai peran masyarakat dalam mengembangkan pesantren terutama dalam penyelenggaraan dan keberlangsungan pendidikan di dalamnya.

²³ M. Bahri Ghazali, "Pengembangan Lingkungan Hidup dalam Masyarakat, Kasus Pondok Pesantren an-Nuqayah dalam Menumbuhkan Kedaran Lingkungan Hidup" (Disertasi--IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1995).

Temuan dalam penelitian Pradjarta Dirdjasanyata dengan judul *Memelihara Umat, Kiai Pesantren, Kiai Langgar di Jawa* ialah bahwa para kiai ternyata memberi respon yang bervariasi dan bahkan berubah-ubah terhadap perubahan sesuai dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi dirinya dan sesuai pula dengan usahanya mempertahankan posisi penting dalam komunitas lokal dan nasional.²⁴

Fentri Setiawan²⁵ juga melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul *Manajemen Pesantren Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo*. Hasil penelitiannya ialah sebagai berikut, *Pertama*, penyusunan program pesantren di Ponpes Nurul Jadid Paiton dilakukan dalam rapat koordinasi antara pengasuh dengan pengurus pesantren yang kemudian dituangkan ke dalam renstra (rencana strategi). *Kedua*, pengorganisasian di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton dilaksanakan dengan membuat struktur organisasi yang di dalamnya mengatur mengenai pembagian tugas biro, wewenang biro, garis tanggung jawab biro dan kerja sama dari masing-masing biro. *Ketiga*, peran pengasuh di Pondok Pesantren adalah sebagai evaluator dan pengambil keputusan dari setiap kegiatan di pesantren. dan *Keempat*, pengawasan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton tidak sepenuhnya dilakukan oleh pengasuh, tetapi juga dilakukan oleh kepala-kepala biro terhadap bawahannya yang meliputi *supervise*, monitoring dan evaluasi.

²⁴ Pradjarta Dirdjasanyata, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), 192.

²⁵ Fentri Setiawan, "Manajemen Pesantren Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo" (Skripsi--Universitas Negeri Malang, 2008).

Lagi-lagi penelitian ini hanya berfokus di wilayah pesantren saja tanpa meneliti masyarakat luar pesantren.

Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, Ummul Chusnah dalam tesisnya yang berjudul *Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Di SMA Negeri 1 Surakarta*,²⁶ menjelaskan bahwa mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta bukan dengan pesantren. Ini lebih cenderung pada pendidikan umum (sekolah) sementara pesantren tidak dibahas sama sekali.

Nur Jihad,²⁷ juga melakukan penelitian tentang Manajemen Partisipasi Masyarakat. Akan tetapi pembahasannya hanya sebatas mengenai bentuk manajemen partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dan menggambarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya nyaris tidak ditemukan hasil penelitian yang mengurai secara komprehensif peran pesantren dalam mengembangkan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan pesantren. Maka penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan membuktikan betapa besar peran keduanya dalam peningkatan kualitas diri masing-masing.

²⁶ Ummul Chusnah, "Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Di SMA Negeri 1 Surakarta" (Tesis--Surakarta).

²⁷ Nur Jihad, "Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendidikan Islam (Studi Multisitus di SMPN 1 dan MTsN Taliwang Sumbawa Barat)" (Tesis—Sumbawa, 2010).

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk memperoleh data dan fakta tentang pesantren berbasis masyarakat sebagai implementasi manajemen pesantren dan pola relasi antara masyarakat dan pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi.²⁸ Merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya aksi, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁹ Dengan kata lain penelitian yang penulis pakai dalam hal ini adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

2. Sumber Data

Di dalam proses penelitian, data merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan data itulah peneliti dapat menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang menjadi tugas peneliti.³⁰ Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

²⁸ Etnografi sebuah metode penelitian ilmu sosial. Metode ini berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural, lihat pada Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 143.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

³⁰ *Ibid.*, 56.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moeleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan. Selibhnya adalah data tambahan seperti dokumen dan sebagainya.³¹ Dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber pertama ialah Pengasuh pesantren atau pengurus pesantren dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.³² Ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subjek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan. Hal ini pada akhirnya akan ikut menentukan ketepatan hasil penelitian.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan teknik/metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam hal ini maka mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah tersruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.³³ Menurut Cholid Narbuco

³¹ Ibid., 12.

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 36.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), 227.

dan Abu Ahcmadi wawancara adalah proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.³⁴ Metode ini digunakan sebagai metode yang utama untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang penulis lakukan, karena data yang dihasilkan melalui metode wawancara dijadikan sebagai data pokok untuk diolah dan dianalisis.

Dengan prosedur ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pengasuh, pengurus maupun tokoh masyarakat tentang manajemen pesantren Lanbulan, utamanya mengenai hubungannya dengan masyarakat sekitar pesantren maupun masyarakat umum di daerah Kecamatan Tambelangan. Hasil wawancara merupakan informasi atau data pokok yang diperoleh peneliti karena informan tersebut merupakan informan utama tanpa mengabaikan informasi lain.

b. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.³⁵ Observasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Observasi Non Sistematis dan Observasi Sistematis.³⁶

³⁴ Cholid Narbuco dan Abu Achmadi, *Metode*, 83.

³⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Bandar Maju, 1996), 157.

³⁶ Observasi non-sistematis ialah observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan. Sedangkan observasi sistematis, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 157.

Pedoman observasi dalam penelitian ini digunakan sebagai instrument pelengkap dan jenis observasi yang digunakan adalah observasi sistematis dan partisipan dimana pedoman observasi telah dipersiapkan sebelumnya. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi situasi yang objektif dari objek yang akan diteliti terutama tentang manajemen pesantren berbasis masyarakat di pesantren Lanbulan.

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode yang lain, penulis menggunakan metode dokumentasi dalam rangka mencari data tertulis mengenai “hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.³⁷

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu suatu penulisan dengan cara menyempurnakan suatu pendapat yang merupakan fakta dari yang umum, untuk ditarik ke khusus³⁸ tentang hal-hal yang berhubungan dengan manajemen pesantren.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, 231.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metode*, 42.

- b. Induktif, yaitu penulisan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.³⁹

Dalam hal ini tentang masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan manajemen pesanten.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka akan penulis sajikan susunan pembahasan secara sistematis dari bab ke bab beserta sub pembahasannya dengan menyeluruh.

Bab pertama Pendahuluan, berisi latar belakang yang menjadi landasan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah sebagai alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, tujuan penelitian untuk mengetahui hasil dari penelitian, dibahas pula hasil penelitian terdahulu yang berisi tentang kajian penelitian yang pernah dilakukan dan yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian, ditulis juga metodologi penelitian, sumber data, dan teknik pengelolaannya yang bertujuan untuk memperjelas langkah-langkah dalam penelusuran penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan dan pesantren berbasis masyarakat, peran masyarakat dalam pengelolaan pesantren dan kontribusi pesantren dalam mengembangkan masyarakat.

Bab ketiga, menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi manajemen pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang, peran-peran masyarakat terhadap

³⁹ Ibid., 43.

pesantren di Pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang serta kontribusi pesantren dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Bab keempat, berisi tentang analisis tentang hasil penelitian yang dikorelasikan dengan konsep atau teori yang berkaitan dengan hasil penelitian.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan, rekomendasi dan saran.